

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber daya manusia memiliki pengaruh besar untuk mempercepat tingkat pembangunan ekonomi pada suatu negara. Sumber daya manusia (SDM) juga harus mampu mengembangkan kompetensinya sendiri agar dapat ikut berkontribusi dalam pembangunan. Sumber daya manusia (SDM) menurut Ermaya adalah suatu faktor utama yang penting dalam tiap proses pembangunan negara, perusahaan, maupun organisasi. Sumber daya manusia juga bisa dikatakan sebagai *agent of development*, pelaksana dan penentu berhasil tidaknya pembangunan. Sumber daya manusia yang handal merupakan aset dalam pembangunan. Pembangunan akan sulit dilaksanakan di suatu negara, bahkan bisa menyebabkan kegagalan dalam pelaksanaannya apabila kualitas sumber daya manusianya sangat rendah.

Sumber daya manusia memiliki salah satu fungsi sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja adalah penduduk dalam usia kerja (berusia 15-64 tahun) yang memiliki kemampuan untuk mengeluarkan usaha tiap satuan waktu guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk oranglain. Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja.

Angkatan kerja terdiri dari golongan yang berkerja dan golongan yang menganggur dan mencari pekerjaan. Kelompok bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan yang mengurus rumah tangga dan golongan

lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam angkatan kerja sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja.



Gambar 1.1**Gambaran Struktur Angkatan Kerja (AK)**

Sumber: dari tabel BPS dan diolah penulis, 2018

Dikutip dalam website kemdikbud.go.id (17/05/2016) Presiden Joko Widodo (Jokowi) seringkali berpesan agar pemerintah fokus menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas sehingga Indonesia bisa melakukan lompatan kemajuan dan mengejar ketertinggalan dengan negara-negara lain. Presiden menambahkan “Kita harus mampu membalikkan piramida kualifikasi tenaga kerja yang saat ini mayoritas masih berpendidikan SD dan SMP menjadi sebuah tenaga kerja yang terdidik dan terampil,” tutur Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas tentang pendidikan dan pelatihan vokasi beberapa waktu lalu.

Seperti yang disampaikan oleh Presiden bahwa kualitas sumber daya manusia kita masih rendah bahkan dalam hal penyerapan tenaga kerjapun di Indonesia masih di dominasi oleh pekerja lulusan SD dan SMP. Ternyata sebelumnya juga pernah dikutip di media berita online dari suara.com dalam wawancaranya kepada kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin (05/05/2015) dilaporkan bahwa BPS mencatat bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia masih didominasi

pekerja dengan latar belakang pendidikan rendah, yaitu Sekolah Dasar (SD) dan SMP.

Tabel 1.1

Data Angkatan Kerja yang bekerja berdasarkan tamatan pendidikan tertinggi per bulan Agustus dari tahun 2013-2016

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Angkatan Kerja /Agustus 2013	Angkatan Kerja /Agustus 2014	Angkatan Kerja /Agustus 2015	Angkatan Kerja /Agustus 2016
	Bekerja	Bekerja	Bekerja	Bekerja
Tidak/belum pernah sekolah	5.452.641	5.187.494	4.387.904	4.018.359
Tidak/belum tamat SD	15.860.456	15.815.487	14.951.112	14.134.282
SD	32.498.783	32.952.556	31.487.578	31.814.185
SLTP	20.562.185	20.350.838	20.698.644	21.358.030
SLTA Umum/SMU	17.876.245	18.579.737	19.813.373	20.413.413
SLTA Kejuruan/SMK	9.968.310	10.520.757	10.837.249	12.170.267
Akademi/Diploma	2.928.268	2.956.780	3.086.444	3.416.119
Universitas	7.614.184	8.264.377	9.556.895	11.087.318
Tak Terjawab	-	-	-	-
Total	112.761.072	114.628.026	114.819.199	118.411.973

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Padahal di Indonesia kita memiliki satuan pendidikan atau institusi sekolah yang mempersiapkan peserta didiknya untuk mampu terjun langsung di dunia kerja setelah lulus yaitu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). SMK dipersiapkan untuk mencetak tenaga terampil yang siap bekerja dengan berbagai kompetensi dan mampu mengikuti perkembangan IPTEK. Hal tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 15 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 yang menyebutkan bahwa: “SMK merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Pendidikan kejuruan mempunyai tujuan umum untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mengembangkan potensi peserta didik agar memiliki akhlak mulia, pengetahuan dan wawasan

kebangsaan yang luhur; serta mempunyai tujuan khusus yaitu menyiapkan peserta didik dengan pengetahuan, kompetensi, teknologi dan seni agar menjadi manusia produktif, maupun bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi.“

Mengacu pada isi penjelasan pasal 15 UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 di atas, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja di bidang tertentu. Namun sampai saat ini tujuan tersebut belum tercapai. Hal ini disebabkan karena sistem penyelenggaraan pendidikan tidak sesuai dan sejalan dengan definisi peserta didik yang dijelaskan dalam pasal 15 UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003. Kurang maksimalnya pencapaian tujuan pendidikan merupakan akibat dari sistem pendidikan yang tidak memberikan ruang bagi anak untuk mengembangkan potensi, bakat dan minatnya. Akibatnya masih banyak lulusan SMK yang tidak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya, dan menyebabkan pengangguran.

Banyak juga yang menyebutkan berdasarkan telusuran dari media online dan kenyataan dilapangan terdapat anomali lulusan pendidikan SMK yang memiliki penyerapan tenaga kerja yang rendah dibandingkan lulusan pendidikan lainnya, bahkan untuk angkatan kerja yang tidak pernah bersekolah dan tidak tamat SD pun memiliki persentase yang lebih baik dibandingkan lulusan SMK. Badan Pusat Statistik (BPS) juga menampilkan dari data angkatan kerja yang ada di Indonesia,

tercatat seberapa besar persentasinya dari angkatan kerja yang ada dari yang bekerja dengan yang menganggur sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penyerapan Tenaga Kerja berdasarkan tamatan pendidikan tertinggi per bulan Agustus dari tahun 2013-2016

Angkatan Kerja per bulan Agustus dalam 4 tahun	Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan	Tidak/belum pernah sekolah	Tidak/belum tamat SD	SD	SLTP	SLTA Umum/SMU	SLTA Kejuruan/SMK	Akademi/ Diploma	Universitas	Total
Angkatan Kerja pada Agustus 2013	Bekerja	5.452.641	15.860.456	32.498.783	20.562.185	17.876.245	9.968.310	2.928.268	7.614.184	112.761.072
	Pengangguran	81.432	489.152	1.347.555	1.689.643	1.925.660	1.258.201	185.103	434.185	7.410.931
	Jumlah AK	5.534.073	16.349.608	33.846.338	22.251.828	19.801.905	11.226.511	3.113.371	8.048.369	120.172.003
	% Bekerja / AK	98,53	97,01	96,02	92,41	90,28	88,79	94,05	94,61	93,83
Angkatan Kerja pada Agustus 2014	Bekerja	5.187.494	15.815.487	32.952.556	20.350.838	18.579.737	10.520.757	2.966.780	8.264.377	114.628.026
	Pengangguran	74.898	389.550	1.229.652	1.566.838	1.962.786	1.332.521	193.517	495.143	7.244.905
	Jumlah AK	5.262.392	16.205.037	34.182.208	21.917.676	20.542.523	11.853.278	3.150.297	8.759.520	121.872.931
	% Bekerja / AK	98,58	97,60	96,40	92,85	90,45	88,76	93,86	94,35	94,06
Angkatan Kerja pada Agustus 2015	Bekerja	4.387.904	14.951.112	31.487.578	20.698.644	19.813.373	10.837.249	3.086.444	9.556.895	114.819.199
	Pengangguran	55.554	371.542	1.004.961	1.373.919	2.280.029	1.569.690	251.541	653.586	7.560.822
	Jumlah AK	4.443.458	15.322.654	32.492.539	22.072.563	22.093.402	12.406.939	3.337.985	10.210.481	122.380.021
	% Bekerja / AK	98,75	97,58	96,91	93,78	89,68	87,35	92,46	93,60	93,82
Angkatan Kerja pada Agustus 2016	Bekerja	4.018.359	14.134.282	31.814.185	21.358.030	20.413.413	12.170.267	3.416.119	11.087.318	118.411.973
	Pengangguran	59.346	384.069	1.035.731	1.294.483	1.950.626	1.520.549	219.736	567.235	7.031.775
	Jumlah AK	4.077.705	14.518.351	32.849.916	22.652.513	22.364.039	13.690.816	3.635.855	11.654.553	125.443.748
	% Bekerja / AK	98,54	97,35	96,85	94,29	91,28	88,89	93,96	95,13	94,39

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) berdasarkan dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Dari data tersebut menunjukkan bahwa persentase tingkat penyerapan tenaga kerja tamatan atau lulusan SMK ini paling rendah. Hal ini menjadi suatu koreksian bagi kualitas dari lulusan SMK. Institusi pendidikan kejuruan ini seharusnya bisa menghasilkan tingkat penyerapan tenaga kerja yang paling tinggi, karena banyak hal yang dipelajari langsung tentang kejuruan, dan ini harusnya menjadikan SMK lebih mampu menguasai pekerjaan di dunia kerja sesuai kejuruannya dibandingkan dengan SMA ataupun tingkat pendidikan di bawahnya.

Menurut analisis buku tentang tata kelola SMK dari direktur pembinaan SMK penyebab rendahnya keterserapan ketenagakerjaan SMK adalah lebih banyak

disebabkan karena dampak Revolusi Industri, maka apabila dirinci dari berbagai sumber dan kajian dapat kita sebut sebagai berikut penyebab rendahnya ke bekerjaan lulusan SMK dibanding lulusan SMA:

1. Keahlian yang dimiliki oleh lulusan SMK tidak cocok dengan yang dibutuhkan Dunia Kerja Dunia Industri;
2. Revolusi Industri Keempat membuka peluang lebih banyak bagi lulusan SMA yang lebih mengedepankan sistem kerja berdasar keterampilan berfikir logis, membuat konsep, kreatifitas dan inovasi.
3. Lulusan SMK didominasi dengan keterampilan membuat produk dan jasa yang sudah mengalami kejenuhan di pasar industri.
4. Kelebihan penawaran tenaga kerja (*Over Supply Of Labor*) yang didominasi oleh lulusan SMK, hal ini efek atas program kebijakan proporsi 30:70, SMA 30 dan SMK 70, sehingga lulusan SMK yang dihasilkan lebih banyak dari lulusan SMA.

Kesenjangan antara kompetensi belajar di SMK dan kompetensi yang diperlukan dalam pasar kerja mendapatkan perhatian dari Pemerintah dalam bentuk perubahan kurikulum dengan cara penyesuaian kurikulum di sekolah dengan kebutuhan Dunia Usaha/Industri. Selain itu Pemerintah juga akan melakukan tata ulang program keahlian yang memang sudah tidak sesuai dengan program keahlian baru yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan Dunia Usaha/Industri saat ini.

Berangkat dari permasalahan tersebut dikutip dari website kemdikbud.go.id (16/09/2016) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan Instruksi Presiden

(Inpres) Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dalam rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Inpres tersebut dikeluarkan pada tanggal 9 September 2016 di Jakarta dan ditujukan kepada 12 Menteri Kabinet Kerja (termasuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), 34 Gubernur, dan Kepala Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).

Dalam isi Inpres tersebut, Presiden Jokowi menginstruksikan kepada para menteri, para gubernur, dan Kepala BNSP agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk merevitalisasi SMK guna meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Presiden juga menginstruksikan supaya disusun peta kebutuhan tenaga kerja bagi lulusan SMK sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

Tercantum dalam Inpres tersebut, Presiden mengkhhususkan untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) agar berjalan sesuai rencana yang diharapkan. Mendikbud merupakan instansi terpenting yang sangat menentukan kebijakan ini berhasil atau tidak direalisasikan. Karena SMK berada dalam naungan Mendikbud, maka ini menjadi ujung tombak pelaksanaan revitalisasi. Presiden Jokowi memberikan enam instruksi, diantaranya: membuat peta jalan SMK; menyempurnakan dan menyelaraskan kurikulum SMK dengan kompetensi sesuai kebutuhan pengguna lulusan (*link and match*); meningkatkan jumlah dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan SMK; meningkatkan kerja sama dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan dunia usaha/industri;

meningkatkan akses sertifikasi lulusan SMK dan akreditasi SMK; dan membentuk Kelompok Kerja Pengembangan SMK.

Dalam pengembangan SMK, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan memiliki arah pengembangan pendidikan kejuruan. Pada abad ke 21 masyarakat akan menghadapi tantangan baru dengan kompleksitas yang tinggi di berbagai segi kehidupan. Pemerintah harus menyiapkan masyarakat yang sadar akan kemajuan pengetahuan. Kemudian dibutuhkan manajemen pendidikan yang sistematis dalam pengelolaan pendidikan nasional yang salah satu fokusnya adalah pendidikan kejuruan. Pemerintah melakukan berbagai persiapan dalam melaksanakan pengembangan pendidikan kejuruan, ada 3 fokus utama dalam pengembangannya. Pertama, pemutakhiran kurikulum dengan mengacu pada kebutuhan jenis-jenis kecakapan baru di era industri 4.0. Kedua, inovasi pembelajaran menjadi target revitalisasi SMK. Dan ketiga adalah memperkokoh jalinan kerja sama sekolah dan industri, dan mendongkrak potensi unggulan wilayah menjadi unggulan nasional untuk menciptakan daya saing bangsa.

Gambar 1.2
Fishbone Structure Revitalisasi Pendidikan Vokasi



Sumber : Kilasan dua tahun revitalisasi SMK (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan)

Kemendikbud juga merancang prosedur-prosedur dalam melaksanakan revitalisasi SMK agar tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik. Layaknya sebuah sistem, alur dalam penentuan revitalisasi perlu di rancang dengan terstruktur. Mulai dari mengidentifikasi masalah hingga ke tujuan akhir atau output. Berikut adalah gambar dari alur mekanisme program revitalisasi SMK.

Gambar 1.3
Diagram Alur Mekanisme Program Revitalisasi SMK



Sumber : Kilasan dua tahun revitalisasi SMK (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan)

Kemendikbud merumuskan langkah revitalisasi SMK yang akan dilakukan melalui Direktorat Pembinaan SMK. Kemudian menetapkan lima area revitalisasi

yang terdiri atas kurikulum, guru dan tenaga kependidikan, kerjasama dengan Dunia Usaha/Industri, sertifikasi dan akreditasi, serta sarpras dan kelembagaan. Perwujudan langkah nyata tersebut dilakukan dengan sepuluh langkah revitalisasi SMK.

Gambar 1.4
Perwujudan Revitalisasi SMK



Sumber: Strategi Implementasi Revitalisasi SMK (Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan) BANDUNG

Reorientasi revitalisasi SMK ini sangat penting dalam beberapa aspek, dengan tujuan agar sekolah menengah kejuruan dapat menyediakan tenaga kerja terampil yang siap kerja di berbagai sektor ekonomi seperti pertanian, industri, pariwisata, bahkan ekonomi kreatif. Diharapkan keberhasilan revitalisasi SMK ini juga dapat meningkatkan produktivitas tenaga kerja Indonesia serta dapat mengurangi permasalahan pengangguran usia produktif.

Revitalisasi akan efektif apabila dimulai dari peningkatan sumber daya manusia berbasis pada Industri yang efektif dan efisien. Sistem administrasi sekolah yang berbasis sistem informasi manajemen, sehingga tercipta keterbukaan informasi dan saling keterkaitan antara lini kurikulum, lini kesiswaan, lini humas, lini administrasi, dan dunia industri. Dibentuk pula kelas - kelas industri dalam rangka mencapai *Link and Match*. Keterampilan yang dimiliki dikembangkan sesuai dengan kearifan lokal melalui kerjasama dengan perguruan tinggi (Lembaga Riset) untuk menciptakan teknoterapan. Teknoterapan akan menghasilkan nilai tambah yang akan menumbuhkan *technopreneurship*. *Technopreneurship* dilakukan untuk mengurangi pengangguran bagi lulusan SMK dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan.

Menindak lanjuti kebijakan tersebut pemerintah yang memiliki keterkaitan dalam melaksanakannya bergerak untuk merealisasikan dengan cepat dan tepat. Meskipun tidak dapat langsung dilaksanakan menyeluruh kepada semua SMK yang berada di Indonesia, ada beberapa SMK yang mendapatkan bantuan langsung revitalisasi dari pusat. Dikutip dalam website Kemdikbud.go.id (18/05/2017) sebanyak 219 SMK yang tersebar di berbagai wilayah Tanah Air akan direvitalisasi langsung oleh Kemendikbud, sedangkan sisanya diharapkan dapat direvitalisasi oleh pemerintah provinsi. Disebutkannya juga "Kepada kepala dinas pendidikan provinsi, 219 SMK ini kami (Kemendikbud) tangani secara terpusat dulu melalui Direktorat Pembinaan SMK. Kami mohon SMK lain yang jumlahnya sangat banyak mohon revitalisasinya ditangani pemerintah provinsi. Kami siap membantu," ujar Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

(Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad, saat meresmikan peluncuran Program Revitalisasi SMK di Stadion Manahan Surakarta, Jawa Tengah, Rabu (17/5/2017).

Gambar 1.5

Foto Dirjen Dikdasmen wawancara dalam peluncuran program Revitalisasi SMK di stadion Manahan Surakarta Jateng (17/05/2017)



Sumber: Website Kemdibud.go.id

Ke-219 SMK yang akan direvitalisasi Kemendikbud tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Aceh sampai Papua. SMK itu antara lain berlokasi di Aceh (4 SMK), DI Yogyakarta (13 SMK), DKI Jakarta (8 SMK), Gorontalo (3 SMK), di Jawa Barat (21 SMK), di Jawa Tengah (35 SMK), dan di Papua Barat (3 SMK). Hamid mengatakan, hingga tahun 2019, Kemendikbud akan merevitalisasi 1.650 SMK dari total SMK di Indonesia sebanyak 13.600 SMK, sedangkan revitalisasi SMK lainnya diserahkan kepada pemerintah provinsi. Revitalisasi tahap pertama sebanyak 219 SMK ini diharapkan tahun depan telah mengalami kemajuan dan perkembangan. "Kemungkinan pada akhir tahun, mungkin sekitar bulan Oktober atau November, Presiden Jokowi dan Mendikbud Muhadjir Effendy akan mengunjungi SMK-SMK itu untuk melihat apa yang sudah

dihasilkan," tutur Hamid. Namun, ia menegaskan, proses revitalisasi 219 SMK itu tidak akan berhenti sampai akhir tahun 2017. Revitalisasi akan terus dilakukan sampai SMK-SMK itu memenuhi komponen-komponen dalam Program Revitalisasi SMK.

Namun dalam pelaksanaannya kebijakan revitalisasi ini masih banyak kendala yang terjadi, meskipun memiliki tujuan yang sangat menguntungkan bagi siswa-siswi lulusan SMK. Banyak sekali kendala yang ditemui oleh guru-guru SMK sebagai ujung tombak pelaksana kebijakan tersebut. Seperti yang penulis lakukan pada wawancara pra penelitian kepada salah satu guru SMK mengatakan bahwa demi terlaksananya revitalisasi SMK ini guru-guru sering melaksanakan kunjungan ataupun pelatihan di luar sekolah yang menyebabkan ditinggalkannya kegiatan pembelajaran kepada siswa di sekolah, bahkan kadang kunjungan dan pelatihan tersebut memakan waktu berhari-hari. Hal lain yang menjadi kendala juga adalah pelaksanaan revitalisasi SMK ini tidak benar-benar diinformasikan secara mendetail kepada setiap individu warga sekolah mau guru, siswa ataupun pekerja lainnya yang berada di dalam sekolah. Banyak yang belum mengetahui atau benar-benar paham mengenai konsep dari program atau kebijakan ini. Padahal pemahaman tentang kebijakan ini sangat diperlukan agar seluruh komponen bersinergi dalam menyukseskannya.

Di Jawa Barat khususnya kota Bandung terdapat beberapa sekolah yang mendapatkan prioritas revitalisasi, diantaranya adalah SMKN 1 Bandung, SMKN 3 Bandung, SMKN 9 Bandung, SMKN 10 Bandung, dan SMKN 13 Bandung. SMK Negeri 13 Bandung menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan prioritas

melaksanakan revitalisasi. Penulis melakukan wawancara pra penelitian ke SMK Negeri 13 Bandung, bahwa benar sekolah tersebut menjadi salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan program revitalisasi langsung dari pemerintah pusat bahkan mendapatkan bantuan dana paling besar untuk melaksanakan kebijakan Revitalisasi SMK tersebut.

SMK Negeri 13 Bandung juga sebelumnya pernah mendapatkan predikat salah satu sekolah RSBI (Rintisan Sekolah Berstandar Internasional), namun saat ini telah dihapuskan oleh MK karena sekolah-sekolah yang mendapatkan predikat RSBI/SBI dikhawatirkan akan mengakibatkan dualisme pendidikan, kemahalan biaya menimbulkan diskriminasi pendidikan dan terjadi kastanisasi antara sekolah yang mendapatkan predikat tersebut dengan yang tidak. Pada masa tersebut, sekolah ini menjadi incaran atau menjadi salah satu sekolah favorit yang ada di Jawa Barat, SMK Negeri 13 Bandung pernah menjadi salah satu sekolah dengan peminat yang tinggi bahkan menjadi incaran calon siswa-siswi dari luar kota.

SMK Negeri 13 Bandung memiliki berbagai prestasi dari mulai siswanya maupun tenaga pendidiknya. Sekolah ini juga sering mengikuti kompetisi-kompetisi seperti perlombaan atau olimpiade mengenai akademik atau yang lainnya, kemudian sekolah ini juga beberapa kali mencetak lulusannya yang mampu dan diterima di perusahaan luar negeri ternama, salah satunya 4 pelajar pernah diterima bekerja di perusahaan aromatic di California Amerika Serikat. Dengan segudang prestasinya ini menyebabkan SMK Negeri 13 Bandung menjadi dikenal dalam dunia pendidikan di tingkat kota, provinsi maupun nasional.

SMK Negeri 13 Bandung ini juga sering menjadi pionir dalam beberapa program yang dilaksanakan oleh sekolah, seperti menjadi model sekolah adiwiyata mandiri, menjadikan sekolah ini menjadi contoh-contoh sekolah lain dalam melaksanakan sekolah adiwiyata. Kemudian juga tengah melaksanakan sekolah ramah anak, dimana program ini menciptakan kondisi atau pola pembelajaran yang ada disekolah berkolaborasi dengan keinginan siswa-siswinya, aturan-aturan dibuat atas kesepakatan antara anak dan guru, hal tersebut bertujuan agar setiap aturan lebih mudah untuk ditaati namun apabila dilanggar siswa tidak akan komplet dengan sanksi yang akan menimpanya karena siswa tersebut sudah tau dan menyepakati mengenai sanksi tersebut. Setelah itu juga sekolah ini menjadi salah satu sekolah yang menerapkan kebijakan sekolah hemat energi yang diadakan oleh menteri ESDM.

Banyak program-program yang telah dilaksanakan oleh SMK Negeri 13 Bandung ini, yang kemudian akan menjadi menarik untuk dilakukan penelitian mengenai pengimplementasian suatu kebijakan, karena akan menjadi ukuran dari hasil pelaksanaan kebijakan tersebut dan juga agar menjadi bahan informasi dan acuan bagi sekolah lain yang belum menerapkan program atau kebijakan serupa.

Maka dari pemaparan diatas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN REVITALISASI SMK DALAM RANGKA PENINGKATAN KUALITAS DAN DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA INDONESIA (STUDI PADA SMK NEGERI 13 BANDUNG)”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat di identifikasikan beberapa masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia.
2. Masih tingginya penyerapan tenaga kerja lulusan pendidikan SD dan SMP.
3. Terjadi anomali dari penyerapan tenaga kerja berdasarkan lulusan pendidikan tertinggi, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi terjadi pada lulusan/tamatan pendidikan SMK.
4. Diperlukan perubahan sistem di SMK agar kembali menjadi baik dan memiliki daya saing serta keterampilan yang kompeten dibidangnya dalam mencetak lulusannya sehingga dapat diterima dan dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja.
5. Dikeluarkannya Kebijakan Instruksi Presiden tentang Revitalisasi SMK dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
6. Adanya kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi SMK ini.
7. Beberapa sekolah mendapatkan fokus bantuan Revitalisasi SMK, dan SMK Negeri 13 Bandung merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan prioritas bantuan terbesar di kota Bandung mengenai program tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana implemmentasi kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di SMK Negeri 13 Bandung?
2. Apa saja yang menjadi kendala dalam melaksanakan kebijakan revitalisasi SMK di SMK Negeri 13 Bandung?
3. Bagaimana cara mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan kebijakan revitalisasi SMK di SMK Negeri 13 Bandung?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, maka penelitian ini memiliki tujuan :

1. Untuk mengetahui implemmentasi kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di SMK Negeri 13 Bandung.
2. Untuk mengetahui yang menjadi kendala dalam melaksanakan kebijakan revitalisasi SMK di SMK Negeri 13 Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi dalam melaksanakan kebijakan revitalisasi SMK di SMK Negeri 13 Bandung.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai kebijakan Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia ini diharapkan mampu

memberikan gambaran yang jelas dan bermanfaat bila dilihat dari teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik khususnya dalam konteks Implementasi Kebijakan Publik.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi penulis

Penelitian ini sebagai persyaratan tugas akhir dan dengan penelitian ini, penulis dapat menerapkan ilmu-ilmu yang sudah dipelajari sebelumnya kedalam suatu permasalahan yang nyata sehingga bermanfaat bagi penulis dalam mengembangkan wawasan.

- b. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan maupun koreksi bagi pemerintah/instansi dinas terkait dalam hal ini adalah di SMK Negeri 13 Bandung, agar mampu melaksanakan kebijakan Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia sesuai dengan ketentuan/kebijakan yang ada.

- c. Bagi masyarakat

Agar dapat memberikan gambaran dan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan kebijakan revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di SMK Negeri 13 Bandung.

F. Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian Implementasi Kebijakan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2016 tentang Revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia, memiliki berbagai aspek yang harus dipahami terlebih dahulu. Yang pertama adalah tentang kebijakan, kebijakan merupakan konsep dari suatu administrasi publik, publik adalah masyarakat umum itu sendiri, yang selayaknya diurus, diatur, dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator. Maka perlu suatu kebijakan dalam mengatur setiap masyarakat yang hidup di dalam suatu negara. Kebijakan merupakan upaya atau tindakan yang dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah yang ada. Kebijakan atau *policy* berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran kebijakan (kelompok target).

Selanjutnya kebijakan publik menurut Said Zainal Abidin (2012: 19) adalah keputusan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk memecahkan masalah atau mewujudkan tujuan yang diinginkan masyarakat.

Sedangkan menurut RC. Chandler dan JC. Plano, kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya-sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah publik. Senada dengan pengertian tersebut, kebijakan tentang revitalisasi SMK ini berhubungan dengan pemanfaatan sumber daya manusia. Kebijakan ini memiliki tujuan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga agar memiliki daya saing.

Apabila sebuah kebijakan tanpa adanya suatu tindakan pelaksanaan atau implementasi hanya akan menjadi suatu naskah belaka, maka suatu kebijakan dibuat harus ada tindak lanjut yang jelas yaitu berupa pelaksanaan atau implementasi dari isi kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang sangat penting bahkan jauh lebih penting daripada formulasi kebijakan, karena kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar menjadi berupa impian/harapan atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.

Implementasi kebijakan secara sederhana dapat diartikan sebagai proses menerjemahkan peraturan ke dalam bentuk tindakan. Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983:61) mendefinisikan sebagai berikut, "Pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya"

Implementasi kebijakan publik merupakan tahapan yang cukup penting karena merupakan realisasi dari apa yang telah dirancang pemerintah untuk mengatasi permasalahan yang ada untuk kepentingan umum. Pelaksanaan sebuah kebijakan belum sepenuhnya mampu menjamin bahwa suatu kebijakan akan benar-benar menyelesaikan suatu masalah dan menimbulkan dampak perubahan tertentu seperti yang diharapkan. Justru kekurangan/kesalahan suatu kebijakan akan diketahui setelah kebijakan itu dilaksanakan, sehingga harus adanya pengawasan terhadap kebijakan yang telah dibuat agar pelaksanaan kebijakan selanjutnya berjalan lebih baik dan dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan dari Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia tersebut dapat berjalan sesuai rencana dan dapat mencapai tujuan yang diharapkan, penulis melakukan pendekatan model teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III. Teori ini sangat berhubungan dengan apa yang akan diteliti karena dapat menjadi ukuran dalam melakukan analisis dari penelitian yang akan dilakukan. Dalam pendekatan ini terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan, yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Benjbaran antara teori dengan kebijakan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

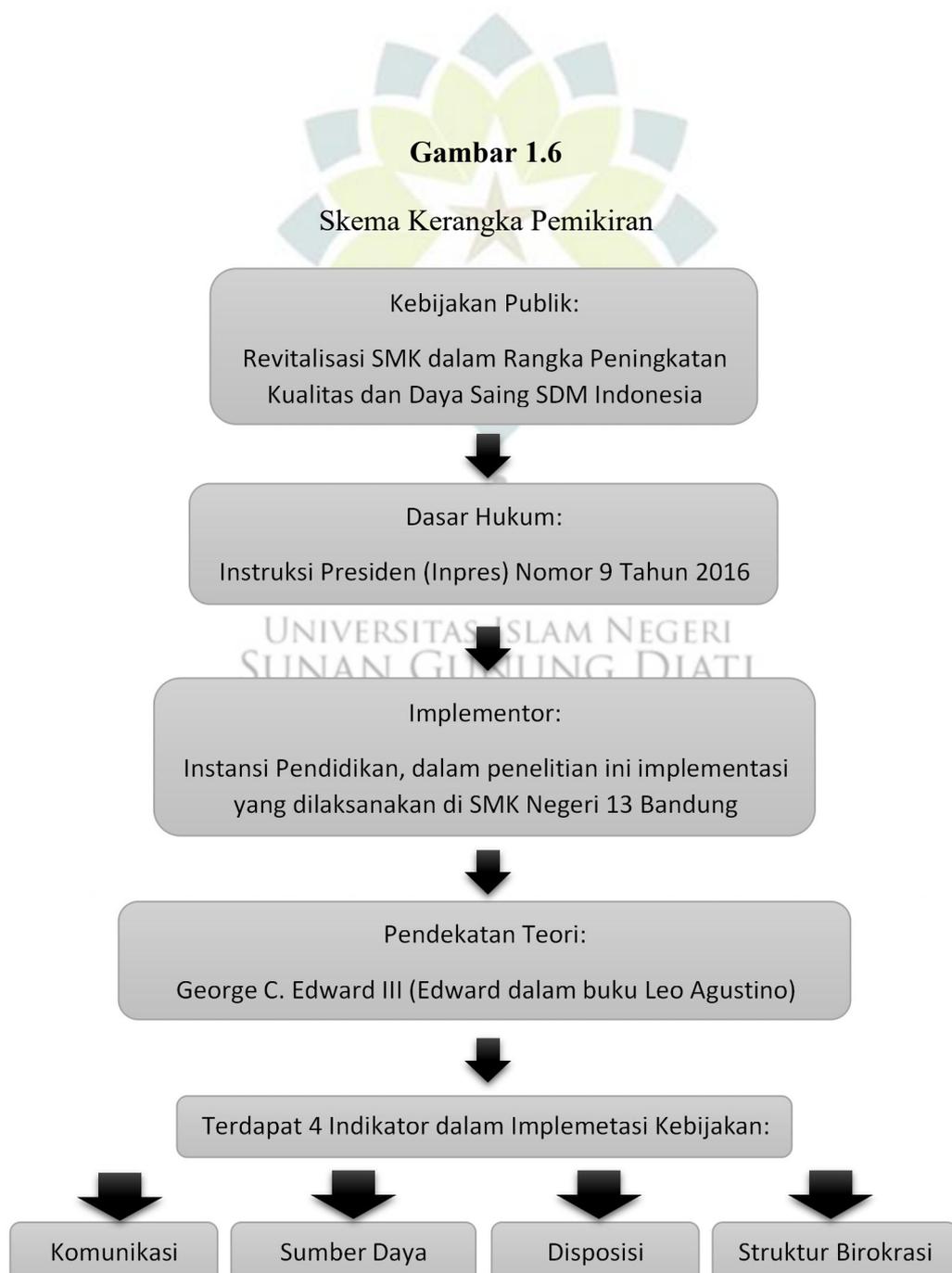
1. Variabel yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) komunikasi merupakan pengiriman dan penerimaan informasi, berita, atau pesan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sehingga maksud atau pesan tersebut dapat dipahami.

Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan, maka agar tercipta kondisi tersebut komunikasi menjadi hal yang penting dilakukan oleh pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan. Dalam kebijakan mengenai revitalisasi SMK dalam rangka peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Indonesia di SMK Negeri 13 Bandung, informasi mengenai kebijakan revitalisasi SMK ini perlu disampaikan dengan jelas dan konsisten kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat tercapai.

2. Variabel yang kedua adalah sumber daya. Sumber daya memiliki peranan penting dalam implementasi kebijakan bahkan sebagai penentu kebijakan tersebut bisa terlaksana atau tidak. Kebijakan mengenai revitalisasi SMK sangat tergantung pada sumber daya yang tersedia, baik sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya sarana dan prasarana maupun sumber daya kewenangan. Mengenai kebijakan ini tujuannya adalah untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, maka perlu banyak didukung oleh banyak sumber daya penunjang.
3. Variabel yang ketiga adalah Disposisi. Disposisi pelaksana merupakan sikap dari para pelaksana kebijakan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksanaan kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau

sasaran. Jika pelaksanaan kebijakan ingin berjalan dengan efektif maka para pelaksana kebijakan tidak hanya tau apa yang dikerjakan tetapi juga harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan tersebut. Disposisi dalam kebijakan ini adalah kemauan, keinginan dan kecenderungan pelaku kebijakan revitalisasi SMK di SMK Negeri 13 Bandung untuk melaksanakan kebijakan tersebut secara bersungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat tercapai.

4. Variabel keempat adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber daya tersedia dan para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harus dikerjakan serta memiliki keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak terlaksana adalah karena kelemahan dalam struktur birokrasi. Struktur Birokrasi mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan dan hubungan antara unit-unit organisasi. Dalam pelaksanaan kebijakan revitalisasi SMK diperlukan hubungan antara organisasi atau instansi terkait dengan kebijakan ini. Didalam Inpresnya saja terdapat banyak instansi yang terkait dan berhubungan demi menunjang terlaksananya kebijakan ini. Maka apabila prosedur dan struktur masih belum bekerjasama dengan baik, harapan mengenai tercapainya tujuan kebijakan tersebut akan sulit direalisasikan.



Sumber: Hasil Olahan Penulis, 2018

